DOKUMEN RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA)

2019

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. Rky. Rasuna Said No. 43 - Telp. (0752) 93947 - 796022 Fax. 90810

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PAYAKUMBUH

Nomor : 600/ 75 /SK/PUPR-PYK/VII-2019

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kinerja, kondisi anggaran pemerintah daerah anggaran tahun sebelumnya yang lebih kecil dari proyeksi, pergeseran pagu kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/ alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, perlu dilakukan perubahan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b, perlu menetapkan pengesahan tentang Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2019.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2010

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032;
14. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);
18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019;
20. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 111 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 Nomor 42).
21. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Memperhatikan Tahapan pelaksanaan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 sesuai dengan aturan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019.

KESATU : Pengesahan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2019.

KEDUA : Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2019.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Payakumbuh

Pada tanggal Juli 2019

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST,M.Si

NIP. 19750402 200003 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Masing-masing yang bersangkutan; dan
2. Arsip.

KATA PENGANTAR

Rasa syukur kami sampaikan kehadirat Allah SWT, atas izinnya kami dapat menyelesaikan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2019.

Sejalan dengan kebijakan sistem pemerintahan dalam mewujudkan *Good Governance,* Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh dituntut untuk mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Strategis sampai pada Rencana Kerja Tahunan. Oleh karenanya pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan menjadi APBD Tahun 2019 jika terdapat ketidaksesuaian dalam pencapaian target ataupun penyesuaian terhadap peraturan-peraturan baru yang berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Daerah termasuk dalam hal ini SKPD Pengguna Anggaran dapat melakukan rancangan perubahan renja SKPD.

Pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2019 telah sampai pada triwulan II yang tergambar pada laporan hasil monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh perlu kiranya untuk dilakukan penyesuaian terhadap target capaian kinerja dan anggaran yang disebabkan berbagai kondisi yang dihadapi di lapangan serta untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan sehingga akan memaksimalkan pencapaian target kinerja dan anggaran pada akhir tahun anggaran.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2019 dapat menjadi acuan pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi kedinasan untuk **mewujudkan Kota Payakumbuh sebagai kota yang tertata dengan infrastruktur yang berkelanjutan.**

Payakumbuh, Juli 2019

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST,M.Si

NIP. 19750402 200003 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 2
DAFTAR TABEL 3
BAB 1 4
1.1 LATAR BELAKANG 4
1.2 DASAR HUKUM 4
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 6
1.3.1 Maksud 6
1.3.2 Tujuan 6
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 6
BAB 2 8
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN BULAN MEI 2019 8
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH 17
2.3 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT 17
2.4 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH 18
BAB 3 19
BAB 4 31

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh.....10
Tabel 2 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Tahun 2019.....17
Tabel 3 Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2019 23

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pelaksanaan Rencana Pembangunan yang telah dirumuskan dalam rencana strategis merupakan penjabaran dari visi dan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang kemudian diuraikan kedalam pelaksanaan tahunan dalam rencana kerja tahunan SKPD yang mempedomani arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja yang telah disusun dan kemudian ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD, pelaksanaannya pada tahun anggaran dimonitor dan dievaluasi secara berkala, dimana pada penyusunan rancangan perubahan rencana kerja ini telah memasuki semester II tahun 2019. Hasil monitoring dan evaluasi ini menjadi dasar dalam memastikan pencapaian maksimal target yang telah ditentukan.

Merujuk pada hasil monitoring dan evaluasi tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019, yang bertujuan menjalankan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja SKPD dalam memberikan pelayanan masyarakat sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD. Dengan begitu pencapaian visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2017 – 2022, yaitu terwujudnya penataan, pemanfaatan dan pengendalian ruang yang didukung oleh infrastruktur yang handal dapat dimaksimalkan. Rancangan Perubahan Rencana Kerja ini dimaksudkan untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan agar terarah dan memaksimalkan pencapaian tujuan yang juga berpedoman pada aturan hukum yang berlaku.

1.2 DASAR HUKUM

Dalam penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2019 mengacu pada aturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032;
16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);
20. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 1);

21. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
22. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019;
23. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 111 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 Nomor 42).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh tahun 2019 adalah

1. Melakukan penyesuaian terhadap aturan baru yang belum terakomodir pada perencanaan yang telah dilakukan;
2. Melakukan penyesuaian terhadap target dan anggaran kegiatan yang tidak terserap secara keseluruhan;
3. Menambahkan paket pekerjaan baru yang belum terakomodir pada perencanaan awal rencana kerja SKPD.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh tahun 2019 adalah:

1. Memberikan layanan pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, dan urusan pertanahan yang berkualitas, efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai dengan aturan yang berlaku;
2. Tersedianya informasi tentang pengelolaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, serta urusan pertanahan yang cepat dan akurat;
3. Mewujudkan sinkronisasi antara substansi dokumen Rancangan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2019 dengan substansi dokumen Perubahan RKPD Tahun 2019;

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sistematika perubahan Renja SKPD Tahun 2019 disusun sebagaimana berikut:

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan dasar pertimbangan perubahan, maksud, tujuan dan dasar hukum pelaksanaan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh tahun 2019.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Triwulan II

Memberikan gambaran dari pelaksanaan target Renstra dari awal tahun RPMJD yang tertuang pada Renja SKPD tahun 2017 sampai pada Triwulan II tahun 2019, dan perkiraan capaian

sampai akhir tahun 2019 berdasarkan APBD tahun 2019 yang sudah disahkan, dan tergambar pada tabel 2.1.

Bab III Rencana Program dan Kegiatan dalam Rancangan Perubahan Renja SKPD

Memuat informasi mengenai program kegiatan pada tahun 2019 yang mengacu pada rencana Strategis SKPD dan APBD 2019 yang akan dilakukan perubahan, baik itu belum dilaksanakan, digeser, dihapuskan, maupun penambahan dari paket pekerjaan berikut dengan indikator kegiatan yang semuanya dirangkum pada tabel 3.1

Bab IV Penutup

Memuat informasi-informasi yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan, catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaan maupun dalam rencana tindak lanjut.

BAB 2

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN BULAN MEI 2019

Seiring dengan telah ditetapkannya APBD Tahun 2019, maka setiap SKPD Kota Payakumbuh telah dapat melakukan realisasi terhadap program kegiatan yang telah disusun. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk tahun 2019 melaksanakan 21 program dan 75 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.115.299.006.485 (Seratus lima belas miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah).

Pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2019 menghadapi berbagai kondisi di lapangan, sehingga mempengaruhi tingkat realisasi target kinerja dan anggaran yang telah ditetapkan yang tergambar dari hasil monitoring program dan kegiatan yang dilakukan secara internal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang baik secara bulanan maupun triwulanan. Dari hasil monitoring internal ini, kemudaian dilakukan evaluasi program dan kegiatan yang nantinya akan menjadi dasar untuk melakukan rancangan perubahan rencana kerja SKPD pada tahun 2019. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pasal 346 menyatakan Penyusunan rancangan perubahan RKPD dimulai paling lambat pada awal bulan Juni, sehingga dasar evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan untuk triwulan II digunakan data akhir bulan Mei 2019.

Hasil monitoring dan evaluasi triwulan II (bulan Mei) 2019, Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh terealisasi sebesar Rp.6.651.193.156,- (Enam miliar enam ratus lima puluh satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu seratus lima puluh enam rupiah) atau 6,14% dari total pagu anggaran yang telah ditetapkan, sedangkan realisasi fisik sebesar 6,58%. Hasil monitoring dan evaluasi yang tercatat dalam laporan monitoring dan evaluasi diketahui bahwa program dan kegiatan rutin memiliki realisasi optimal. Sedangkan untuk kegiatan yang realisasinya belum optimal didominasi oleh kegiatan yang bersifat fisik, hal ini disebabkan oleh paket-paket pekerjaan yang ada pada kegiatan tersebut masih dalam proses lelang, proses perencanaan, pembuatan kontrak sehingga belum tercatat sebagai paket pekerjaan yang telah direalisasikan baik secara kinerja maupun keuangan dalam laporan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh ataupun kegiatan yang telah dilakukan kontrak tetapi tidak menyerap seluruh anggaran yang dikarenakan adanya efisiensi atau tender yang dimenangkan oleh penyedia dibawah pagu yang ditetapkan. Dalam mengoptimalkan capaian target kinerja tahun 2019, maka dilakukan perubahan Rencana Kerja Tahun 2019, dimana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh melakukan rancangan perubahan pada 18 program dan 58 kegiatan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh disamping sebagai pengguna anggaran, juga memberikan kontribusi terhadap penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah melalui penyewaan Alat berat, dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Hasil monitoring dan evaluasi penerimaan pendapatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh sampai dengan triwulan II (Bulan Mei) 2019 sebesar

Rp.147.382.800 (Seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) atau 20,13% dari target penerimaan yang telah ditetapkan. Rangkuman realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1 Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh

NO	KODE REKENING	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TARGET KEUANGAN (RP)	TARGET FISIK	REALISASI KEUANGAN		PROP. ANGG.	REALISASI FISIK		%KEG.	KINERJA	KINERJA		%KINERJA
						RP	%CAP		%	%CAP			TARGET	REALISASI	
I	**1.01.03.1.01.03.01.01.**	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**6.836.207.724**	**2.882.260.764**	**41,67%**	**2.516.512.193**	**63,59%**	**36,81%**	**27,34%**	**65,60%**	**64,80%**	**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT**	**81,00**	**81,10**	**100,12%**
1	1.01.03.1.01.03.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	4.742.240.000	1.975.930.000	41,67%	1.872.938.356	94,79%	39,49%	39,30%	94,32%	94,51%	JUMLAH REKENING LISTRIK TELEPON DAN AIR YANG DIBAYARKAN	144,00	36,00	25,00%
2	1.01.03.1.01.03.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL	39.914.500	11.747.500	41,67%	5.650.000	48,10%	14,16%	11,70%	28,08%	36,09%	JUMLAH KENDARAAN DINAS YANG DIBAYAR PAJAKNYA	95,00	15,00	15,79%
3	1.01.03.1.01.03.01.01.07	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	710.876.000	290.172.000	41,67%	222.398.000	76,64%	31,29%	31,17%	74,81%	75,54%	JUMLAH JASA ADMINISTRASI KEUANGAN YANG DIBAYARKAN	264,00	110,00	41,67%
4	1.01.03.1.01.03.01.01.08	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	97.142.664	33.043.936	41,67%	27.854.049	84,29%	28,67%	7,86%	18,86%	45,04%	JUMLAH TENAGA KEBERSIHAN DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR	36,00	12,00	33,33%
5	1.01.03.1.01.03.01.01.09.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	25.438.000	7.000.000	41,67%	2.960.000	42,29%	11,64%	6,51%	15,62%	26,29%	JUMLAH PERALATAN KERJA YANG DIPERBAIKI	12,00	2,00	16,67%
6	1.01.03.1.01.03.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	58.673.500	29.336.750	41,67%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	JUMLAH ALAT TULIS KANTOR YANG DIBELI	46,00	-	0,00%
7	1.01.03.1.01.03.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	41.021.000	18.710.000	41,67%	13.200.000	70,55%	32,18%	32,18%	77,23%	74,56%	JUMLAH FOTOCOPY CETAK DAN JILID DOKUMEN DINAS YANG DISEDIAKAN	82.935,00	28.560,00	34,44%
8	1.01.03.1.01.03.01.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	7.949.000	3.974.500	41,67%	954.000	24,00%	12,00%	12,00%	28,80%	26,88%	JUMLAH INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN BANGUNAN KANTOR YANG DISEDIAKAN	16,00	5,00	31,25%
9	1.01.03.1.01.03.01.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	71.035.000	71.035.000	41,67%	39.995.050	100,00%	56,30%	96,55%	231,72%	179,03%	JUMLAH PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR YANG DISEDIAKAN	9,00	9,00	100,00%
10	1.01.03.1.01.03.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	24.960.000	10.400.000	41,67%	6.080.000	58,46%	24,36%	24,36%	58,46%	58,46%	JUMLAH BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DISEDIAKAN	4.776,00	826,00	17,29%
11	1.01.03.1.01.03.01.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	48.652.500	19.360.000	41,67%	14.902.510	76,98%	30,63%	30,63%	73,51%	74,90%	JUMLAH MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERSEDIA UNTUK KEGIATAN DINAS	3.422,00	1.171,00	34,22%
12	1.01.03.1.01.03.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	705.547.968	303.947.318	41,67%	228.486.882	75,17%	32,38%	32,32%	77,57%	76,61%	JUMLAH RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH, KELUAR DAERAH DAN KELUAR NEGERI	81,00	45,00	55,56%
13	1.01.03.1.01.03.01.01.19.	PENYEDIAAN TENAGA ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERKANTORAN	262.757.592	107.603.760	41,67%	81.093.346	75,36%	30,86%	30,78%	73,87%	74,47%	JUMLAH GAJI TENAGA ADMINISTRASI DAN TENAGA TEKNIS PERKANTORAN YANG DIBAYARKAN	108,00	36,00	33,33%
II	**1.01.03.1.01.03.01.02.**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**2.510.520.700**	**1.325.976.000**	**41,67%**	**97.414.064,00**	**13,74%**	**3,88%**	**8,74%**	**20,97%**	**18,08%**	**PERSENTASE KONDISI SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN DALAM KONDISI BAIK**	**85,00**	**50,00**	**58,82%**
14	1.01.03.1.01.03.01.02.03.	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	1.783.019.500	945.857.000	41,67%	6.842.000	0,72%	0,38%	17,43%	41,83%	25,39%	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR SKALA KOTA YANG DIBANGUN	3,00	-	0,00%
15	1.01.03.1.01.03.01.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	245.000.000	187.119.000	41,67%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA KANTOR YANG DIPELIHARA	2,00	1,00	50,00%

NO	KODE REKENING	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TARGET KEUANGAN (RP)	TARGET FISIK	REALISASI KEUANGAN		PROP. ANGG.	REALISASI FISIK		%KEG.	KINERJA	KINERJA		%KINERJA
						RP	%CAP		%	%CAP			TARGET	REALISASI	
16	1.01.03.1.01.03.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	452.501.200	165.000.000	41,67%	90.172.064	54,65%	19,93%	18,26%	43,82%	48,15%	JUMLAH KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL YANG DIPELIHARA	49,00	23,00	46,94%
17	1.01.03.1.01.03.01.02.29.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR	5.000.000	3.000.000	41,67%	400.000	13,33%	8,00%	8,00%	19,20%	16,85%	JUMLAH MEBELEUR YANG DIPELIHARA	14,00	2,00	14,29%
18	1.01.03.1.01.03.01.02.49.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KERJA	25.000.000	25.000.000	41,67%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	PERSENTASE PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KERJA YANG TERSEDIA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN	85,00	70,00	82,35%
III	**1.01.03.1.01.03.01.03.**	**PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**	**61.870.000**	**61.870.000**	**41,67%**	**60.970.000**	**98,55%**	**98,55%**	**98,55%**	**236,52%**	**181,33%**	**PERSENTASE ASN BERPAKAIAN DINAS DENGAN ATRIBUT LENGKAP**	**100,00%**	**85,00%**	**85,00%**
19	1.01.03.1.01.03.01.03.02.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS	61.870.000	61.870.000	41,67%	60.970.000	98,55%	98,55%	98,55%	236,52%	181,33%	JUMLAH ASN BERPAKAIAN DINAS DENGAN ATRIBUT LENGKAP	100,00%	85,00%	85,00%
IV	**1.01.03.1.01.03.01.04.**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR**	**-**	**-**		**-**						**PERSENTASE ASN YANG MENGIKUTI BIMTEK SESUAI DENGAN KOMPETENSI JABATAN**	**100,00**	**100,00**	**100,00%**
												PERSENTASE ASN YANG MENDUDUKI JABATAN SESUAI DENGAN KOMPETENSI	**100,00**	**80,00**	**80,00%**
V	**1.01.03.1.01.03.01.06.**	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**111.409.000**	**54.143.450**	**41,67%**	**29.236.750**	**45,31%**	**26,24%**	**55,69%**	**133,66%**	**98,32%**	**NILAI EVALUASI AKIP DINAS**	**85,00**	**80,14**	**94,28%**
												INDEKS REFORMASI BIROKRASI	**23,50**	**18,18**	**77,36%**
20	1.01.03.1.01.03.01.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	36.965.000	23.803.700	41,67%	14.273.500	59,96%	38,61%	96,67%	232,01%	163,19%	JUMLAH LAPORAN PENCAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA DINAS YANG DISUSUN	7,00	6,00	85,71%
21	1.01.03.1.01.03.01.06.05.	PENYUSUNAN PROFIL SKPD	12.063.500	4.877.000	41,67%	1.258.000	25,79%	10,43%	46,67%	112,01%	77,52%	JUMLAH PROFIL DINAS YANG DISUSUN	1,00	0,50	50,00%
22	1.01.03.1.01.03.01.06.06.	PENYEBARLUASAN DAN PUBLIKASI CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI KINERJA SKPD	26.000.000	7.800.000	41,67%	2.499.200	32,04%	9,61%	41,12%	98,69%	72,03%	JUMLAH CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI KERJA SKPD YANG DISEBARLUASKAN DAN DIPUBLIKASIKAN	10,00	2,00	20,00%
23	1.01.03.1.01.03.01.06.07.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN DOKUMEN PELAYANAN PUBLIK	36.380.500	17.662.750	41,67%	11.206.050	63,44%	30,80%	38,30%	91,92%	80,53%	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN DAN DOKUMEN PELAYANAN PUBLIK YANG DISUSUN	7,00	2,00	28,57%
VI	**1.01.03.1.01.03.01.15.**	**PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN**	**8.499.000.000**	**2.417.451.750**	**41,67%**	**66.794.000**	**4,49%**	**0,79%**	**6,67%**	**16,00%**	**11,40%**	**PERSENTASE PANJANG JALAN STATUS KOTA DALAM KONDISI MANTAP**	**72,06**	**69,21%**	**96,05%**
24	1.01.03.1.01.03.01.15.03.	PEMBANGUNAN JALAN	1.500.000.000	475.325.000	41,67%	61.480.000	12,93%	4,10%	0,00%	0,00%	5,17%	PANJANG JALAN KOTA YANG DIBANGUN	1.327,00	-	0,00%
25	1.01.03.1.01.03.01.15.05.	PEMBANGUNAN JEMBATAN	2.844.000.000	869.950.000	41,67%	2.100.000	0,24%	0,07%	20,00%	48,00%	28,90%	JUMLAH JEMBATAN YANG DIBANGUN	2,00	-	0,00%
26	1.01.03.1.01.03.01.15.11.	PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH	4.155.000.000	1.072.176.750	41,67%	3.214.000	0,30%	0,08%	0,00%	0,00%	0,12%	LUAS LAHAN YANG DIBEBASKAN UNTUK PENINGKATAN DAN PEMBANGUNAN JALAN	2,00	-	0,00%
VII	**1.01.03.1.01.03.01.16.**	**PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/ GORONG-GORONG**	**15.942.157.640**	**4.973.960.903**	**41,67%**	**5.287.000**	**50,05%**	**0,03%**	**0,46%**	**1,10%**	**20,68%**	**PERSENTASE PELAYANAN SISTEM DRAINASE SKALA KOTA**	**47,39**	**51,74**	**109,18%**

NO	KODE REKENING	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TARGET KEUANGAN (RP)	TARGET FISIK	REALISASI KEUANGAN		PROP. ANGG.	REALISASI FISIK		%KEG.	KINERJA	KINERJA		%KINERJA
						RP	%CAP		%	%CAP			TARGET	REALISASI	
27	1.01.03.1.01.03.01.16.01.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/ GORONG-GORONG	13.460.000	2.432.000	41,67%	-	100,00%	0,00%	0,92%	2,21%	41,32%	JUMLAH DOKUMEN TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DRAINASE YANG DISUSUN	2,00	1,00	50,00%
28	1.01.03.1.01.03.01.16.03.	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	15.928.697.640	4.971.528.903	41,67%	5.287.000	0,11%	0,03%	0,00%	0,00%	0,04%	PANJANG DRAINASE YANG DIBANGUN	9.100,00	-	0,00%
VIII	**1.01.03.1.01.03.01.17.**	**PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/ TALUD/ BRONJONG**	**875.084.800**	**9.894.575**	**41,67%**	**6.167.500**	**62,33%**	**0,70%**	**0,72%**	**1,73%**	**25,97%**	**PERSENTASE PENATAAN SUNGAI**	**5,00%**	**0,68%**	**13,56%**
29	1.01.03.1.01.03.01.17.03.	PEMBANGUNAN TURAP/ TALUD/ BRONJONG	875.084.800	9.894.575	41,67%	6.167.500	62,33%	0,70%	0,72%	1,73%	25,97%	PANJANG TURAP/ TALUD/ BRONJONG YANG DIBANGUN	210,00	-	0,00%
IX	**1.01.03.1.01.03.01.18.**	**PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN**	**32.353.886.896**	**13.233.130.296**	**41,67%**	**1.150.174.542**	**16,18%**	**3,55%**	**20,44%**	**49,05%**	**35,90%**	**PERSENTASE JALAN MEMENUHI STANDAR KONSTRUKSI SESUAI FUNGSI**	**26,95%**	**25,42%**	**94,29%**
												PERSENTASE JALAN KOTA YANG DILAYANI PENERANGAN JALAN UMUM	**39,28%**	**39,26%**	**99,95%**
30	1.01.03.1.01.03.01.18.03.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN	11.002.627.076	2.903.392.638	41,67%	609.663.621	21,00%	5,54%	9,72%	23,33%	22,40%	PANJANG JALAN YANG DIPELIHARA	24.600,00	5.300,00	21,54%
31	1.01.03.1.01.03.01.18.04.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN JEMBATAN	645.000.000	236.700.000	41,67%	46.442.000	19,62%	7,20%	45,43%	109,03%	73,27%	JUMLAH JEMBATAN YANG DIPELIHARA	2,00	1,00	50,00%
32	1.01.03.1.01.03.01.18.06.	PENINGKATAN JALAN	19.206.253.300	9.343.034.400	41,67%	340.546.000	3,64%	1,77%	1,60%	3,84%	3,76%	PANJANG JALAN YANG DITINGKATKAN	10.492,00	-	0,00%
33	1.01.03.1.01.03.01.18.07.	JARINGAN LISTRIK DAN PENERANGAN JALAN UMUM	1.500.006.520	750.003.258	41,67%	153.522.921	20,47%	10,23%	25,00%	60,00%	44,19%	PERSENTASE LAMPU JALAN YANG TERPASANG BERDASARKAN KEBUTUHAN	40,00%	29,30%	73,25%
												JUMLAH LAMPU JALAN YANG DIPELIHARA	815,00	-	0,00%
X	**1.01.03.1.01.03.01.23.**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN**	**980.445.109**	**612.491.876**	**41,67%**	**92.109.277**	**28,10%**	**9,39%**	**36,75%**	**88,21%**	**64,16%**	**PERSENTASE ALAT BERAT DENGAN KONDISI BAIK**	**65,00%**	**52,63%**	**80,97%**
												PERSENTASE ALAT LABORATORIUM DENGAN KONDISI BAIK	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
34	1.01.03.1.01.03.01.23.04.	PENGADAAN ALAT-ALAT BERAT	137.400.000	798.000	41,67%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	JUMLAH ALAT BERAT YANG TERSEDIA	20,00	19,00	95,00%
35	1.01.03.1.01.03.01.23.06.	PENGADAAN ALAT-ALAT UKUR DAN BAHAN LABORATORIUM KEBINAMARGAAN	444.130.000	440.415.000	41,67%	-	0,00%	0,00%	91,67%	220,01%	132,00%	JUMLAH ALAT LABORATORIUM YANG TERSEDIA	39,00	18,00	46,15%
36	1.01.03.1.01.03.01.23.10.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN ALAT-ALAT BERAT	291.161.029	126.289.450	41,67%	64.521.560	51,09%	22,16%	28,46%	68,30%	61,42%	JUMLAH ALAT BERAT YANG DIPELIHARA	10,00	2,00	20,00%
37	1.01.03.1.01.03.01.23.12.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN ALAT-ALAT UKUR DAN BAHAN LABORATORIUM KEBINAMARGAAN	107.754.080	44.989.426	41,67%	27.587.717	61,32%	25,60%	26,88%	64,51%	63,24%	JUMLAH ALAT LABORATORIUM YANG DIPELIHARA	39,00	18,00	46,15%
XI	**1.01.03.1.01.03.01.24.**	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA**	**16.244.105.258**	**5.073.229.876**	**41,67%**	**845.768.543**	**27,42%**	**5,21%**	**7,49%**	**17,97%**	**21,75%**	**PERSENTASE PANJANG IRIGASI DENGAN KONDISI BAIK**	**80,23%**	**77,72%**	**96,87%**
												PERSENTASE DAERAH IRIGASI BERKINERJA BAIK	**79,10%**	**77,73%**	**98,26%**
												PERSENTASE KELOMPOK P3A/GP3A YANG AKTIF	**80,00%**	**74,67%**	**93,33%**

NO	KODE REKENING	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TARGET KEUANGAN (RP)	TARGET FISIK	REALISASI KEUANGAN		PROP. ANGG.	REALISASI FISIK		%KEG.	KINERJA	KINERJA		%KINERJA
						RP	%CAP		%	%CAP			TARGET	REALISASI	
												PERSENTASE KETERSEDIAAN DEBIT AIR IRIGASI YANG TERMANFAATKAN	**96,46%**	**94,78%**	**98,26%**
38	1.01.03.1.01.03.01.24.01.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI	184.000.000	4.050.500	41,67%	1.339.250	33,06%	0,73%	0,73%	1,75%	14,28%	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN/ PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI YANG DISUSUN	1,00	-	0,00%
39	1.01.03.1.01.03.01.24.05.	PERENCANAAN NORMALISASI SALURAN SUNGAI	87.006.225	2.089.125	41,67%	1.181.750	56,57%	1,36%	1,36%	3,26%	24,59%	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN, DAN PENATAAN SUNGAI YANG DISUSUN	1,00	-	0,00%
40	1.01.03.1.01.03.01.24.08.	PEMBANGUNAN PINTU AIR	50.000.000	366.000	41,67%	135.125	36,92%	0,27%	0,27%	0,65%	15,16%	JUMLAH PINTU AIR YANG TERSEDIA	1,00	-	0,00%
41	1.01.03.1.01.03.01.24.09.	PELAKSANAAN NORMALISASI SALURAN SUNGAI	2.087.334.775	700.620.975	41,67%	45.254.000	6,46%	2,17%	2,17%	5,21%	5,71%	PANJANG SUNGAI YANG DINORMALISASI	676,00	-	0,00%
42	1.01.03.1.01.03.01.24.10.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI	10.977.786.190	3.057.745.000	41,67%	4.259.950	0,14%	0,04%	0,04%	0,10%	0,11%	PANJANG SALURAN IRIGASI YANG DITINGKATKAN	128.033,00	-	0,00%
43	1.01.03.1.01.03.01.24.13.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN PINTU AIR	61.098.000	20.493.200	41,67%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	LUAS AREAL SAWAH YANG TERALIRI IRIGASI	1.942,00	636,00	32,75%
												JUMLAH PINTU AIR YANG DIPELIHARA	2,00	-	0,00%
44	1.01.03.1.01.03.01.24.14.	REHABILITASI/ PEMELIHARAAN NORMALISASI SALURAN SUNGAI	810.211.335	305.976.437	41,67%	213.805.780	69,88%	26,39%	37,77%	90,65%	82,34%	PANJANG SUNGAI YANG DIPELIHARA	24.451,00	2.820,00	11,53%
45	1.01.03.1.01.03.01.24.15.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI YANG TELAH DIBANGUN	1.401.224.633	815.112.629	41,67%	579.792.688	71,13%	41,38%	32,54%	78,10%	75,31%	PERSENTASE SALURAN IRIGASI YANG DIPELIHARA	56,92%	54,62%	95,96%
												JUMLAH DAERAH IRIGASI YANG DIPELIHARA	65,00	45,00	69,23%
46	1.01.03.1.01.03.01.24.16.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN PETANI PEMAKAI AIR	85.444.100	3.829.700	41,67%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	PERSENTASE P3A/GP3A YANG DIBINA	100,00%	-	0,00%
47	1.01.03.1.01.03.01.24.16.	PEMBANGUNAN PRASARANA IRIGASI POMPA	500.000.000	162.946.310	41,67%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	JUMLAH PRASARANA IRIGASI POMPA YANG TERSEDIA	1,00	-	0,00%
XII	**1.01.03.1.01.03.01.26.**	**PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONVERSI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA**	**6.266.989.879**	**2.227.478.932**	**41,67%**	**906.723.450**	**70,35%**	**14,47%**	**18,00%**	**43,20%**	**54,06%**	**PERSENTASE SUNGAI BERFUNGSI BAIK**	**21,69%**	**31,28%**	**144,21%**
												DEBIT AIR BAKU YANG TERSEDIA	**89,73%**	**84,37%**	**94,03%**
48	1.01.03.1.01.03.01.26.05.	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA	79.443.219	-	41,67%	-	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	JUMLAH KOMUNITAS PEDULI SUNGAI YANG TERBENTUK	17,00	-	0,00%
49	1.01.03.1.01.03.01.26.12.	PENGADAAN TANAH	6.187.546.660	2.227.478.932	41,67%	906.723.450	40,71%	14,65%	36,00%	86,40%	68,12%	JUMLAH LUAS LAHAN YANG DIBEBASKAN UNTUK NORMALISASI SUNGAI	5,00	-	0,00%
XIII	**1.01.03.1.01.03.01.27.**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH**	**1.101.880.000**	**256.147.232**	**41,67%**	**264.240.621**	**61,47%**	**23,98%**	**11,31%**	**27,14%**	**40,87%**	**PERSENTASE JALAN KOTA YANG MEMILIKI DRAINASE**	**85,00%**	**76,99%**	**90,58%**
50	1.01.03.1.01.03.01.27.08.	REHABILITASI/ PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA AIR LIMBAH	916.400.000	214.929.432	41,67%	264.240.621	122,94%	28,83%	22,62%	54,29%	81,75%	PANJANG DRAINASE YANG DIPELIHARA	11.200,00	3.250,00	29,02%
51	1.01.03.1.01.03.01.27.10.	PENYESUAIAN REVISI DOKUMEN RISPAM	185.480.000	41.217.800	41,67%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	JUMLAH DOKUMEN REVISI RISPAM YANG DIKAJI DAN DIEVALUASI	1,00	-	0,00%
XIV	**1.01.03.1.01.03.01.29.**	**PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH**	**3.687.206.500**	**2.519.987.875**	**41,67%**	**101.425.825**	**26,37%**	**2,75%**	**18,41%**	**44,17%**	**37,05%**	**PERSENTASE JALAN KOTA YANG MEMILIKI TROTOAR**	**14,41%**	**14,25%**	**98,91%**

NO	KODE REKENING	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TARGET KEUANGAN (RP)	TARGET FISIK	REALISASI KEUANGAN		PROP. ANGG.	REALISASI FISIK		%KEG.	KINERJA	KINERJA		%KINERJA
						RP	%CAP		%	%CAP			TARGET	REALISASI	
												PERSENTASE BANGUNAN GEDUNG PEMERINTAH YANG MEMILIKI SLF	**13,11**	**5,20**	**39,66%**
												PERSENTASE PENYEDIAAN SARANA PERKANTORAN TERTENTU YANG REPRESENTATIF	**71,00**	**60,00**	**84,51%**
52	1.01.03.1.01.03.01.29.01.	PERENCANAAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR	7.656.500	4.158.750	41,67%	2.609.500	62,75%	34,08%	35,00%	84,00%	75,50%	JUMLAH DOKUMEN HSBGN YANG DITERBITKAN	4,00	1,00	25,00%
53	1.01.03.1.01.03.01.29.02.	PEMBANGUNAN/ PENINGKATAN INFRASTRUKTUR	3.262.787.000	2.343.582.000	41,67%	76.600.000	3,27%	2,35%	0,00%	0,00%	1,31%	PANJANG TROTOAR YANG DIBANGUN	540,00	-	0,00%
54	1.01.03.1.01.03.01.29.03.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	34.763.000	17.226.125	41,67%	8.133.875	47,22%	23,40%	41,67%	100,01%	78,89%	JUMLAH LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI YANG DISUSUN	42,00	33,00	78,57%
55	1.01.03.1.01.03.01.29.04.	PENINGKATAN DAN PENGUATAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR	237.000.000	82.521.000	41,67%	4.803.350	5,82%	2,03%	8,00%	19,20%	13,85%	JUMLAH PERTIMBANGAN TEKNIS PERENCANAAN BANGUNAN YANG DIKELUARKAN (LEGES GAMBAR)	300,00	117,00	39,00%
56	1.01.03.1.01.03.01.29.04.	REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN TROTOAR	145.000.000	72.500.000	41,67%	9.279.100	12,80%	6,40%	7,36%	17,66%	15,72%	PANJANG TROTOAR YANG DIPELIHARA	700,00	-	0,00%
XV	**1.01.03.1.01.03.01.30.**	**PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN**	**8.570.801.065**	**2.523.985.676**	**41,67%**	**8.235.600**	**0,33%**	**0,10%**	**0,02%**	**0,05%**	**0,16%**	**PERSENTASE JALAN LINGKUNGAN YANG MEMENUHI STANDAR KONSTRUKSI SESUAI FUNGSI**	**40,00%**	**20,00%**	**50,00%**
57	1.01.03.1.01.03.01.30.02.	PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PEDESAAN	8.570.801.065	2.523.985.676	41,67%	8.235.600	0,33%	0,10%	0,02%	0,05%	0,16%	PANJANG JALAN LINGKUNG YANG DIBANGUN	9.185,00	-	0,00%
XVI	**1.01.03.1.01.03.01.31.**	**PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG**	**646.290.064**	**296.357.857**	**41,67%**	**34.081.276**	**0,00%**	**5,27%**	**8,05%**	**19,33%**	**17,54%**	**PERSENTASE KETERSEDIAAN DOKUMEN DAN REGULASI TATA RUANG**	**80,00**	**75,00**	**93,75%**
58	1.01.03.1.01.03.01.31.01.	PENYUSUNAN KEBIJAKAN TENTANG PENYUSUNAN TATA RUANG	162.880.325	139.800.000	41,67%	788.700	0,56%	0,48%	0,48%	1,15%	0,92%	JUMLAH DOKUMEN RTRW YANG DIKAJI DAN DIEVALUASI	1,00	-	0,00%
59	1.01.03.1.01.03.01.31.06.	PENYUSUNAN RENCANA TEKNIS RUANG KAWASAN	238.188.250	7.688.250	41,67%	495.200	6,44%	0,21%	0,21%	0,50%	2,88%	PERSENTASE DOKUMEN RDTR, PZ, RTRK YANG DISUSUN, DIKAJI DAN DIEVALUASI	3,00	3,00	100,00%
60	1.01.03.1.01.03.01.31.16.	PENINGKATAN DAN PENGUATAN PERENCANAAN TATA RUANG	113.298.989	61.847.107	41,67%	31.437.076	50,83%	27,75%	27,84%	66,82%	60,42%	PERSENTASE PENERBITAN KRK/AP YANG SESUAI PERMOHONAN	85,00%	88,10%	103,64%
61	1.01.03.1.01.03.01.31.17.	PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENATAAN RUANG	131.922.500	87.022.500	41,67%	1.360.300	1,56%	1,03%	3,68%	8,83%	5,92%	JUMLAH PETA DIGITAL YANG DIPERBARUI (UPDATE)	1,00	1,00	100,00%
												PERSENTASE PETA ANALOG YANG TERINFORMASIKAN	85,00%	71,43%	84,03%
XVII	**1.01.03.1.01.03.01.32.**	**PROGRAM PEMANFAATAN RUANG**	**489.202.500**	**112.389.507**	**41,67%**	**106.336.650**	**82,29%**	**21,74%**	**23,54%**	**56,49%**	**66,81%**	**PERSENTASE BANGUNAN YANG SESUAI DENGAN DOKUMEN PERIZINAN**	**16,87**	**16,25**	**96,32%**
62	1.01.03.1.01.03.01.32.01.	PENYUSUNAN KEBIJAKAN PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG	7.123.500	3.111.000	41,67%	2.159.000	69,40%	30,31%	0,42%	1,01%	28,36%	JUMLAH ATURAN HUKUM YANG MENGATUR PEMANFAATAN RUANG DAN BANGUNAN	1,00	-	0,00%
63	1.01.03.1.01.03.01.32.05.	SURVEY DAN PEMETAAN	256.669.000	2.611.000	41,67%	1.751.000	67,06%	0,68%	0,68%	1,63%	27,80%	PERSENTASE BANGUNAN YANG SESUAI DENGAN DOKUMEN PERIZINAN	85,00	31,14	36,64%

NO	KODE REKENING	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TARGET KEUANGAN (RP)	TARGET FISIK	REALISASI KEUANGAN		PROP. ANGG.	REALISASI FISIK		%KEG.	KINERJA	KINERJA		%KINERJA
						RP	%CAP		%	%CAP			TARGET	REALISASI	
64	1.01.03.1.01.03.01.32.07.	SOSIALISASI KEBIJAKA, NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN MANUAL PEMANFAATAN RUANG	145.880.000	65.123.982	41,67%	61.775.600	94,86%	42,35%	42,16%	101,18%	98,65%	JUMLAH SOSIALISASI KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR DAN PROSEDUR YANG DILAKSANAKAN	5,00	5,00	100,00%
65	1.01.03.1.01.03.01.32.10.	PENINGKATAN DAN PENGUATAN PEMANFAATAN RUANG	79.530.000	41.543.525	41,67%	40.651.050	97,85%	51,11%	50,89%	122,14%	112,42%	JUMLAH REKOMENDASI IMB YANG DIBERIKAN	700,00	219,00	31,29%
XVIII	**1.01.03.1.01.03.01.33.**	**PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG**	**72.642.800**	**30.257.500**	**41,67%**	**28.770.000**	**95,76%**	**39,60%**	**52,35%**	**125,64%**	**113,69%**	**PERSENTASE PENERTIBAN PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG**	**30,00**	**40,00**	**133,33%**
												PERSENTASE KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG	**79,20**	**78,98**	**99,72%**
66	1.01.03.1.01.03.01.33.01.	PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	7.179.000	4.199.000	41,67%	4.199.000	100,00%	58,49%	58,49%	140,38%	124,23%	JUMLAH ATURAN HUKUM YANG MENGATUR PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	1,00	-	0,00%
67	1.01.03.1.01.03.01.33.05.	PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG	14.052.500	8.407.500	41,67%	7.720.000	91,82%	54,94%	54,94%	131,86%	115,84%	JUMLAH PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG YANG DILAKSANAKAN	350,00	140,00	40,00%
68	1.01.03.1.01.03.01.33.09.	PENINGKATAN DAN PENGUATAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	51.411.300	17.651.000	41,67%	16.851.000	95,47%	32,78%	43,62%	104,69%	101,00%	JUMLAH SANKSI RUANG YANG DITERBITKAN	350,00	140,00	40,00%
XIX	**1.01.03.1.01.03.01.34.**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI**	**154.804.550**	**89.850.050**	**41,67%**	**55.567.350**	**69,72%**	**35,90%**	**31,07%**	**74,57%**	**72,63%**	**PERSENTASE KEPATUHAN PELAKU PEMBANGUNAN SESUAI DOKUMEN TATA RUANG**	**32,02**	**31,43**	**98,16%**
69	1.01.03.1.01.03.01.34.02.	ANALISA / PENGKAJIAN KELAYAKAN PERIZINAN	8.322.025	2.190.000	41,67%	2.190.000	100,00%	26,32%	0,00%	0,00%	40,00%	JUMLAH IUJK YANG DIKELUARKAN	80,00	31,00	38,75%
70	1.01.03.1.01.03.01.34.04.	PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI	8.798.750	4.873.175	41,67%	3.079.000	63,18%	34,99%	48,19%	115,66%	94,67%	PERSENTASE BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI YANG MEMENUHI KUALIFIKASI	71,00	31,00	43,66%
71	1.01.03.1.01.03.01.34.05.	PEMBINAAN KOMPETENSI DAN PRODUKTIFITAS KONSTRUKSI	36.576.250	32.546.600	41,67%	14.400.000	44,24%	39,37%	59,65%	143,16%	103,59%	PERSENTASE BADAN USAHA YANG BERMASALAH	-	-	100,00%
72	1.01.03.1.01.03.01.34.06.	PEMBINAAN TERTIB PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI	101.107.525	50.240.275	41,67%	35.898.350	71,45%	35,51%	16,45%	39,48%	52,27%	JUMLAH SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DISELENGGARAKAN	4,00	1,00	25,00%
XX	**1.01.03.1.01.03.01.35.**	**PROGRAM PERLUASAN DAN PENINGKATAN SAMBUNGAN RUMAH (SR)**	**2.958.602.000**	**991.905.300**	**41,67%**	**59.245.000**	**200,25%**	**2,00%**	**14,51%**	**34,82%**	**23,28%**	**PERSENTASE PELAYANAN AIR MINUM**	**96,22%**	**96,60%**	**100,39%**
												PERSENTASE RUMAH YANG TERLAYANI AIR MINUM PERPIPAAN	**92,97%**	**96,26%**	**103,54%**
73	1.01.03.1.01.03.01.35.01.	PENINGKATAN IDLE CAPACITY SARANA PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)	2.958.602.000	991.905.300	41,67%	59.245.000	5,97%	2,00%	14,51%	34,82%	23,28%	PANJANG JARINGAN DISTRIBUSI AIR MINUM YANG DIBANGUN	2.795,00	-	0,00%
XXI	**1.01.03.1.01.03.01.37.**	**PROGRAM PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM**	**6.885.560.000**	**47.090.250**	**41,67%**	**1.280.400**	**1,86%**	**0,02%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,01%**	**PERSENTASE KETERSEDIAAN FASILITAS UMUM PERKOTAAN**	**83,33**	**68,00**	**81,60%**
												PERSENTASE BANGUNAN GEDUNG PEMERINTAH YANG REPRESENTATIF	**71,00**	**68,00**	**95,77%**
74	1.01.03.1.01.03.01.37.01.	PENGADAAN TANAH MESJID AGUNG	6.885.560.000	47.090.250	41,67%	1.280.400	0,02%	0,02%	0,00%	0,00%	0,01%	PERSENTASE PENYEDIAAN SARANA IBADAH SKALA KOTA	10,00	5,20	52,00%

NO	KODE REKENING	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TARGET KEUANGAN (RP)	TARGET FISIK	REALISASI KEUANGAN		PROP. ANGG.	REALISASI FISIK		%KEG.	KINERJA	KINERJA		%KINERJA
						RP	%CAP		%	%CAP			TARGET	REALISASI	
XXII	**1.02.04.1.01.03.01.16.**	**PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH**	**50.340.000**	**928.025**	**41,67%**	**419.000**	**83,23%**	**0,83%**	**4,42%**	**10,61%**	**6,70%**	**PERSENTASE SERTIFIKASI ASET TANAH DAN BANGUNAN PEMKO**	**61,56**	**60,48**	**98,25%**
75	1.02.04.1.01.03.01.16.01.	PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN , PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	50.340.000	928.025	41,67%	419.000	0,83%	0,83%	4,42%	10,61%	6,70%	JUMLAH ASET TANAH PEMKO YANG MEMILIKI DOKUMEN HIBAH/ PENYERAHAN	631,00	620,00	98,26%
PERSENTASE REALISASI KEUANGAN			**115.299.006.485**	**36.107.698.792**	**41,67%**	**9.932.584.670**	**27,51%**	**8,61%**	**21,17%**	**50,80%**	**46,44%**				**51,38%**

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH

Untuk mewujudkan penataan, pemanfaatan pengendalian ruang dan pembangunan infrastruktur yang handal, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh melakukan analisis kinerja pelayanan yang didasarkan pada fungsi dinas, sehingga memunculkan beberapa aspek utama yang dikonversi ke jabaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, dimana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh, memiliki 8 (delapan) indikator kinerja yang tergambar pada tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Tahun 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS DINAS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2019	REALISASI Tw II (Mei) 2019
1.	Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan rencana tata ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	79,20	78,98
2.	Meningkatnya infrastruktur dasar publik yang sesuai standar	Persentase pelayanan air minum	98,80	96,74
		Persentase panjang jalan status kota kondisi mantap	72,06	69,20
		Persentase daerah irigasi berkinerja baik	79,10	77,81
		Persentase sistem drainase skala kota	45,95	51,74
		Persentase ketersediaan fasilitas umum perkotaan	83,33	77,81
		Persentase penataan sungai	21,69	18,56
		Hasil penilaian AKIP oleh Inspektorat	A	A

Sumber: Laporan Monev Kinerja Mei 2019

Tabel diatas memberikan informasi kepada kita bahwa dalam pelayanan kepada masyarakat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh pada triwulan II tahun 2019 rata-rata realisasi indikator kinerja telah hampir mencapai target yang telah ditetapkan. Walaupun demikian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh sebagai SKPD yang bertanggung jawab terhadap pelayanan infrastruktur dasar masyarakat terus berupaya memberikan layanan terbaiknya baik melalui anggaran pemerintah daerah maupun usulan menggunakan anggaran Provinsi dan Nasional, sehingga visi SKPD dalam mewujudkan penataan, pemanfaatan pengendalian ruang dan pembangunan infrastruktur yang handal dapat terwujud dan ditingkatkan.

2.3 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Sebagaimana halnya Rencana Kerja Tahun 2019 yang telah ditetapkan menjadi APBD tahun 2019, Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2019 juga melalui proses penyusunan sebagaimana yang telah ditetapkan aturan perencanaan, salah satunya mengakomodir usulan aspirasi masyarakat baik yang bersumber dari musrenbang maupun dari aspirasi dewan yang diperoleh dari penyampaian masyarakat ke pada anggota dewan. Hal ini dilakukan dalam upaya mewujudkan Kota Payakumbuh tertata, termanfaatkan dan terkendali ruangnya didukung oleh infrastruktur yang handal. Selain itu prioritas daerah juga dipertimbangkan dalam rancangan perubahan rencana kerja SKPD tahun 2019. Kesemua usulan tersebut tentunya sudah harus melalui kelayakan administratif dan teknis serta disesuaikan dengan dan keuangan daerah.

2.4 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2019, terdapat beberapa isu penting yang adanya penyelesaian dan pembentukan langkah dan arah kebijakan dalam mengatasinya. Berdasarkan hasil analisis pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2019, maka identifikasi permasalahan yang paling utama dihadapi saat ini adalah:

1. Lemahnya pengendalian dan pengawasan internal;
2. Belum optimalnya kompilasi dan integrasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan informasi strategis sebagai basis data perencanaan dan penganggaran;
3. Belum Optimalnya koordinasi antara Perangkat daerah dan antar bidang dalam pembinaan dan rekonsiliasi data;
4. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan memerlukan SDM yang kompeten, baik dalam pemanfaatan teknologi maupun secara teknis kebidangan.

Dengan demikian kesimpulan dari isu strategis di atas adalah bagaimana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh pada Tahun 2019 dapat memaksimalkan, dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki baik asset, SDM, dan sistem kerja untuk menyediakan infrastruktur dasar yang sesuai standar, dan meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan rencana tata ruang.

BAB 3

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2019 memuat formulasi dari pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan. Adapun penjabarannya disajikan dalam bentuk matrik Rencana Program dan kegiatan pada tabel 3.1 Dalam mencapai sasaran strategis dinas ini melaksanakan 21 program dan 75 kegiatan dengan dana yang dibutuhkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh pada tahun 2019 adalah Rp.115.090.775.016,- bergeser dari pagu sebelumnya sebesar Rp.115.299.006.485,- dimana terjadi pengurangan sebesar Rp.208.231.469,- yang bersumber dari penyesuaian nilai paket pekerjaan yang telah dilakukan kontrak, efisiensi pemakaian anggaran, pergeseran penggunaan anggaran, dan analisis hasil evaluasi kegiatan dengan kondisi di lapangan yang telah dilakukan. Selanjutnya pengurangan dan penambahan pagu anggaran program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik bertambah sebesar Rp.13.200.000,-. Perubahan terjadi karena adanya penyesuaian kebutuhan air dan listrik;

2) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional mengalami penguranagan sebesar Rp.8.102.000,- karena peyesuaian belanja STNK kendaraan dinas/operasional;

3) Penyediaan jasa administrasi keuangan mengalami pengurangan sebesar Rp.26.162.000,-. Perubahan terjadi karena penyesuaian honor jasa keuangan;

4) Penyediaan jasa kebersihan kantor berkurang sebesar Rp.2.958.912,- karena penyesuaian honor THL kebersihan;

5) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja berkurang sebesar Rp.54.000,- karena penyesuaian kebutuhan peralatan kerja;

6) Penyediaan Alat Tulis Kantor berkurang sebesar Rp.500,- karena penyesuaian belanja ATK kantor;

7) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor berkurang sebesar Rp.3000,- karena penyesuaian belanja;

8) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor bertambah sebesar Rp.82.967.850,- karena adanya penyesuaian kebutuhan peralatan kantor;

9) Penyediaan makanan dan minuman berkurang sebesar Rp.10.582.500,- karena efisiensi anggaran;

10) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah mengalami penambahan sebesar Rp.29.526.032,- karena penyesuaian kebutuhan belanja perjalanan dinas;

11) Penyediaan jasa tenaga administrasi dan teknis perkantoran bertambah sebesar Rp.21.269.664,- untuk penyesuaian honor THL.

b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor berkurang sebesar Rp.86.900.000,- karena Pengurangan belanja pemeliharaan gedung balai kota;

2) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional berkurang sebesar Rp.33.654.300,- karena penyesuaian belanja service dan kebutuhan BBM;

3) Pemeliharaan rutin mebeleur berkurang sebesar Rp.1.500.000,- karena adanya penyesuanan harga,-

4) Pembangunan gedung kantor bertambah sebesar Rp.115.976.100,- , penyesuaian kebutuhan untuk pembangunan gedung kantor.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas berkurang Rp.900.000,- karena efisiensi anggaran.

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD berkurang Rp.296.500,- karena efisiensi anggaran;

2) Penyusunan Profil SKPD berkurang Rp.37.750,- karena efisiensi anggaran;

3) Penyebarluasan dan Publikasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD berkurang Rp.110.000,- karena efisiensi anggaran;

4) Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pelayanan publik berkurang Rp.372.600,- karena efisiensi anggaran.

e. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

1) Pembangunan jalan bertambah sebesar Rp.217.051.000,- karena penambahan pekerjaan pembangunan jalan dan juga ada pengurangan penyesuaian harga kontrak;

2) Pembangunan Jembatan berkurang sebesar Rp.1.806.516.000,- karena Pengurangan sisa nilai kontrak;

3) Pengadaan tanah bertambah sebesar Rp.356.910.000,- karena penambahan dana untuk penyesuaian honor tim dan konsultan perencana KJPP.

f. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong

1) Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong berkurang sebesar Rp.1.047.542.435,- karena penyusaian harga kontrak;

2) Perencanaan pembangunan drainase/gorong-gorong berkurang sebesar Rp.13.460.000,- karena rasionalisasi anggaran.

g. Program Pembangunan Turab/talud Bronjong

Pembangunan turab/ talud bronjong berkurang sebesar Rp.22.451.980,-. Perubahan karena adanya penyesuaian nilai pagu anggaran dengan nilai kontrak.

h. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

1) Peningkatan jalan dengan bertambah sebesar Rp.Rp.1.352.619.966,- karena adanya penambahan paket pekerjaan peningkatan jalan;

2) Rehabilitasi/pemeliharaan jalan bertambah sebesar 480.135.000 , karena ada penambahan paket untuk rehab dan pemeliharaan jalan;

3) Jaringan listrik berkurang sebesar Rp.70.425.000 karena penyesuaian kebutuhan dan pemasangan PJU dan penyesuaian honor.

i. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

1) Pengadaan alat-alat ukurdan laboratarium pengurangan sebesar Rp.54.620.000,- karena peneyesuaian harga kontrak.

j. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

1) Perencanaan pembangunan jaringan irigasi penambahan sebesar Rp.115.005.000,- karena adanya penambahan paket pekerjaan;

2) Pelaksanaan normalisasi saluran sungai mengalami pengurangan sebesar Rp.421.264.150,- perubahan karena adanya penyesuaian belanja modal pengadaan GPS dan alat ukur curah hujan;

3) Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi mengalami penambahan sebesar menjadi Rp.130.897.240,-. Perubahan karena adanya penambahan paket pekerjaan;

4) Rehabilitasi /pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun mengalami penambahan sebesar Rp.13.500.000, karenaadanya beberap item penyesuaian;

5) Pembangunan prasarana irigasi pompa , kegiatan ini bernilai Rp.500.000.000, pada perubahan di hilangkan.

k. Program Pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan suber air lainnya bertambah sebesar Rp.47.950.000, untuk penambahan belanja makan minum dan belanja pakaian peserta dan penambahan alat inspeksi sungai;

2) Pengadaan Tanah mengalami penambahan sebesar Rp.1.848.377.832,- karena kebutuhan biaya ganti wajar, tanaman dan bangunan dengan estimasi harga KJPP untuk batang agam.

l. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

1) Monitoring, evaluasi dan pelaporan berkurang Rp.100.950,- karena penyesuaian dengan standar biaya dan kebutuhan pelaksanaan kegiatan;

2) Pembangunan/peningkatan infrastruktur berkurang sebesar Rp.411.527.000 karena pengurangan paket pekerjaan yang tidak bisa dilaksankan;

3) Peningkatan dan penguatan pengembangan infrastruktur berkurang sebesar Rp.65.034.850,- karena pengurangan belanja TABG;

4) Rehabilitasi dan pemeliharaan trotoar berkurang sebesar Rp.50.770.000 karena ada pengurangan dan swakelola pemeliharaan trotoar.

m. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan berkurang sebesar Rp.165.159.601,- karena adanya penyesuaian harga kontrak.

n. Program Perencanaan Tata Ruang

1) Penyusunan kebijakan teteng penyusunan tata berkurang sebesar Rp.29.500,- karena penyesuaian harga kontrak;

2) Revisi rencana teknis ruang kawasan berkurang sebesar Rp.10.585.500,- karena perubahan trget menjadi 1 BWP;

3) Pengembangan sistem informasi penataan ruang berkurang sebesar Rp.93.089.650, karena penyesuaian belanja tenaga IT.

o. Program Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi

1) Pembinaan kompetensi dan produktifitas konstruksi berkurang sebesar Rp.3.100.400,- karena pengeurangan belanja ATK dan penggandaaan;

2) Pembinaan tertib penyelenggaraan kontruksi bertambah sebesar Rp.400.625,- karena adanya peneyesuaian sewa gedung rapat dan makan minum.

p. Program Pembangunan Fasilitas Umum

1) Pengadaan Tanah Untuk masjid Agung berkurang sebesr Rp.17.950.000 karena penyesuaian honor tim pengadaan tanah.

q. Urusan Pertanahan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2019 terdiri dari 1 program dan 1 kegiatan yaitu Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan kegiatan Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah tidak mengalami perubahan dengan anggaran sebesar Rp.50.340.000,-

Dari perincian di atas ada 1 kegiatan dari Dinas Pekarjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh yang dihapuskan atau dirasionalisasikan pada perubahan rencana kerja tahun 2019 yaitu kegiatan Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong dengan anggaran sebesar Rp.13.460.000,- dihapuskan, dengan keluaran kerja atau capaian output dokumen perencanaan menjadi bagian dari Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2019 dirangkum pada tabel 3.1 dibawah ini :

Tabel 3 Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2019

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS	SASARAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN						SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
					CAPAIAN PROGRAM (INDIKATOR SASARAN)		KELUARAN (OUTPUT)		HASIL (OUTCOME)				
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**4**	**Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintahan**		**Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**81,00**	**6.836.207.724**	**6.935.308.358**	
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Dinas PUPR Kota Payakumbuh			Jumlah rekening listrik, telepon dan air yang dibayarkan	144 rekening bulan			4.742.240.000	4.755.440.000	13.200.000,00
01.06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional			Dinas PUPR Kota Payakumbuh			Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional yang dibayarkan	79 unit			39.914.500	31.812.500	(8.102.000,00)
01.07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Dinas PUPR Kota Payakumbuh			Jumlah jasa administrasi keuangan yang dibayarkan	982 orang bulan			710.876.000	684.714.000	(26.162.000,00)
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Dinas PUPR Kota Payakumbuh			1. Jumlah Tenaga kebersihan yang dibayarkan; 2. Jumlah bahan kebersihan kantor yang tersedia	36 orang bulan 429 buah			97.142.664	94.183.752	(2.958.912,00)
01.09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Dinas PUPR Kota Payakumbuh			Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	123 unit			25.438.000	25.384.000	(54.000,00)
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor			Dinas PUPR Kota Payakumbuh			Jumlah alat tulis kantor yang dibeli	3231 buah			58.673.500	58.673.000	(500,00)
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Dinas PUPR Kota Payakumbuh			Jumlah cetak, fotokopi dan jilid dokumen dinas yang disediakan	500 buah 2 kotak 550 buku 82937 lembar			41.021.000	41.021.000	0,00
01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Dinas PUPR Kota Payakumbuh			Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	155 buah/ roll			7.949.000	7.946.000	(3.000,00)
01.13.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Dinas PUPR Kota Payakumbuh			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	16 unit 5 set			71.035.000	154.002.850	82.967.850,00
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Dinas PUPR Kota Payakumbuh			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	4776 eksp			24.960.000	24.960.000	0,00
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman			Dinas PUPR Kota Payakumbuh			Jumlah makanan dan minuman yang tersedia untuk kegiatan dinas	1300 porsi 1300 bungkus 120 galon 40 kotak			48.652.500	38.070.000	(10.582.500,00)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS	SASARAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN						SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
					CAPAIAN PROGRAM (INDIKATOR SASARAN)		KELUARAN (OUTPUT)		HASIL (OUTCOME)				
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah			Dinas PUPR Kota Payakumbuh			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam, luar daerah dan luar negeri yang dilakukan	152 perjalanan			705.547.968	735.074.000	29.526.032,00
01.19.	Penyediaan tenaga administrasi dan teknis perkantoran			Dinas PUPR Kota Payakumbuh			Jumlah jasa tenaga administrasi dan tenaga teknis perkantoran dibayarkan	108 orang bulan			262.757.592	284.027.256	21.269.664,00
02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**4**	**Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintahan**		**Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Persentase Kondisi Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam kondisi baik**	**80,00%**	**2.510.520.700**	**2.605.114.500**	
02.03.	Pembangunan gedung kantor			Dinas PUPR Kota Payakumbuh			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor skala kota yang dibangun	3 unit			1.783.019.500	1.999.667.600	216.648.100,00
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Dinas PUPR Kota Payakumbuh			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	1 unit			245.000.000	158.100.000	(86.900.000,00)
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Dinas PUPR Kota Payakumbuh			Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	83 unit			452.501.200	418.846.900	(33.654.300,00)
02.29.	Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur			Dinas PUPR Kota Payakumbuh			Jumlah mebeleur yang dilakukan pemeliharaan rutin	14 unit			5.000.000	3.500.000	(1.500.000,00)
02.49.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja			Dinas PUPR Kota Payakumbuh			Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kerja yang dilakukan	10 unit			25.000.000	25.000.000	0,00
03.	**PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**	**4**	**Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintahan**		**Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Persentase ASN berpakaian dinas dan atribut lengkap**	**100,00%**	**61.870.000**	**60.970.000**	
03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			Dinas PUPR Kota Payakumbuh			Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang dilakukan	151 stel			61.870.000	60.970.000	(900.000,00)
06.	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**4**	**Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintahan**		**Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**			**Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat**	**A**	**111.409.000**	**110.556.150**	
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Dinas PUPR Kota Payakumbuh			Jumlah jenis laporan pencapaian kinerja dan ikhtisar kinerja yang disusun	10 dokumen			36.965.000	36.668.500	(296.500,00)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS	SASARAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN						SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
					CAPAIAN PROGRAM (INDIKATOR SASARAN)		KELUARAN (OUTPUT)		HASIL (OUTCOME)				
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
06.05.	Penyusunan Profil SKPD			Dinas PUPR Kota Payakumbuh			Jumla buku profil dinas PUPR yang disusun	45 eksemplar			12.063.500	11.989.750	(73.750,00)
06.06.	Penyebarluasan dan Publikasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD			Dinas PUPR Kota Payakumbuh			Jumlah capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD yang disebarluaskan dan dipublikasikan	10 liputan			26.000.000	25.890.000	(110.000,00)
06.07.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik			Dinas PUPR Kota Payakumbuh			Jumlah dokumen perencanaan dan dokumen pelayanan publik yang disusun	7 dokumen			36.380.500	36.007.900	(372.600,00)
15.	**PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN**	**3**	**Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan**		**Persentase Panjang Jalan dengan kondisi Mantap**	**72,06%**			**Persentase jalan memenuhi standar fungsi**	**26,95%**	**8.499.000.000**	**7.180.270.000**	
15.03.	Pembangunan Jalan			Kota Payakumbuh			Panjang jalan baru yang dibangun	1410 meter			1.500.000.000	1.630.876.000	130.876.000,00
15.05.	Pembangunan Jembatan			Kota Payakumbuh			Jumlah jembatan baru yang dibangun	1 unit			2.844.000.000	1.037.484.000	(1.806.516.000,00)
15.09.	Pelaksanaan Pengadaan Tanah			Kota Payakumbuh			Jumlah persil lahan yang dibebaskan untuk pembangunan dan peningkatan jalan	5 ruas			4.155.000.000	4.511.910.000	356.910.000,00
16.	**PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG**	**3**	**Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan**		**Persentase Sistem Drainase Skala Kota**	**45,95%**			**Persentase Jalan Kota yang Memiliki Drainase**	**45,02%**	**15.942.157.640**	**14.857.005.205**	
16.01.	Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong			Kota Payakumbuh			Jumlah dokumen teknis perencanaan pembangunan drainase yang disusun	0 dokumen			13.460.000	0	(13.460.000,00)
16.03.	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong			Kota Payakumbuh			Panjang drainase yang dibangun	17.100 meter			15.928.697.640	14.857.005.205	(1.071.692.435,00)
17.	**PROGRAM PEMBANGUNAN TURAB/TALUD/BRONJONG**	**3**	**Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan**		**Persentase Penataan Sungai**	**21,69%**			**Persentase Sungai yang sudah Dinormalisasi**	**70,08%**	**875.084.800**	**852.632.820**	
17.01.	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong			Kota Payakumbuh			panjang turab/ talud/ bronjong yang dibangun	210 meter			875.084.800	852.632.820	(22.451.980,00)
18.	**PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN**	**3**	**Meningkatkan kualitas dan kuantitas**		**Persentase panjang jalan status kota dengan**	**72,06%**			**1. Persentase jalan memenuhi standar sesuai fungsi;**	**26,95%**	**32.353.886.896**	**34.568.643.862**	

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS	SASARAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN						SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
					CAPAIAN PROGRAM (INDIKATOR SASARAN)		KELUARAN (OUTPUT)		HASIL (OUTCOME)				
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
			infrastruktur perkotaan		**Kondisi Mantap**				**2. Persentase jalan yang dilayani penerangan jalan umum (PJU)**	**39,28%**			
18.03.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan			Kota Payakumbuh			Panjang jalan yang dipelihara	23.000 meter			11.002.627.076	11.482.762.076	480.135.000,00
18.04.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan			Kota Payakumbuh			Jumlah jembatan yang dipelihara	6 unit			645.000.000	591.327.000	(53.673.000,00)
18.06.	Peningkatan Jalan			Kota Payakumbuh			Panjang jalan yang ditingkatkan	10.400 meter			19.206.253.300	21.064.973.266	1.858.719.966,00
18.07.	Jaringan Listrik dan Penerangan Jalan Umum			Kota Payakumbuh			1. Persentase lampu jalan yang terpasang berdasarkan kebutuhan; 2. Jumlah penerangan jalan umum yang dipelihara	38,68% 815 titik			1.500.006.520	1.429.581.520	(70.425.000,00)
23.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN**	**3**	**Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan**		**Persentase Panjang jalan Status Kota dengan Kondisi Mantap**	**72,06%**			**1. Persentase alat berat dengan kondisi baik;** **2. Persentase alat laboratorium dengan kondisi baik**	**65%** **95%**	**980.445.109**	**914.846.109**	
23.04.	Pengadaan alat berat			Dinas PUPR Kota Payakumbuh			Jumlah pengadaan alat berat yang dilakukan	3 unit			137.400.000	123.421.000	(13.979.000,00)
23.06.	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan			Dinas PUPR Kota Payakumbuh			Jumlah pengadaan alat pengujian dan bahan laboratorium yang dilakukan	2 set			444.130.000	389.510.000	(54.620.000,00)
23.10.	Rehab/Pemeliharaan Alat-alat Berat			Dinas PUPR Kota Payakumbuh			Jumlah alat-alat berat yang dipelihara	22 unit			291.161.029	291.161.029	0,00
23.12.	Rehabilitasi alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan			Dinas PUPR Kota Payakumbuh			Jumlah alat laboratorium yang dipelihara	3 set			107.754.080	110.754.080	3.000.000,00
24.	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA**	**3**	**Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan**		**Persentase daerah irigasi berkinerja baik**	**79,10%**			**1. Persentase irigasi dengan kondisi baik;** **2. Persentase Kelompok P3A/ GP3A yang aktif;** **3. Persentase ketersediaan debit air irigasi yang dimanfaatkan**	**1. 80,23%** **2. 80%** **3. 96,46%**	**16.244.105.258**	**15.674.588.948**	
24.01.	Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi			Dinas PUPR Kota Payakumbuh			Jumlah dokumen perencanaan, pembangunan/pemelihara	1 dokumen			184.000.000	299.005.000	115.005.000,00

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS	SASARAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN						SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
					CAPAIAN PROGRAM (INDIKATOR SASARAN)		KELUARAN (OUTPUT)		HASIL (OUTCOME)				
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
							an jaringan irigasi yang disusun						
24.05.	Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai			Dinas PUPR Kota Payakumbuh			Jumlah dokumen perencanaan/ penataan sungai yang disusun	1 dokumen			87.006.225	87.006.225	0,00
24.08.	Pembangunan Pintu air			Kota Payakumbuh			Jumlah pintu air yang dibangun	2 unit			50.000.000	50.000.000	0,00
24.09.	Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai			Kota Payakumbuh			Panjang saluran sungai yang dinormalisasi	530 meter			2.087.334.775	1.666.070.625	(421.264.150,00)
24.10.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi			Kota Payakumbuh			Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	10.400 meter			10.977.786.190	11.203.683.430	225.897.240,00
24.13.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air			Kota Payakumbuh			Jumlah pintu air yang dipelihara	3 unit			61.098.000	61.098.000	0,00
24.14.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai			Kota Payakumbuh			Jumlah daerah aliran sungai yang dipelihara	7 DAS			810.211.335	810.211.335	0,00
24.15.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun			Kota Payakumbuh			1. Persentase irigasi yang dipelihara; 2. Jumlah daerah irigasi yang dipelihara	56,95% 30 DI			1.401.224.633	1.414.724.633	13.500.000,00
24.16.	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Petani Pemakai Air			Kota Payakumbuh			Persentase P3A/GP3A yang dibina	87,00%			85.444.100	82.789.700	(2.654.400,00)
24.23.	Pembangunan Prasarana Irigasi Pompa			Kota Payakumbuh			Jumlah Prasarana Irigasi Pompa yang dibangun	0			500.000.000	0	(500.000.000,00)
26.	**PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN, DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA**	**3**	**Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan**		**Persentase penataan sungai**	**21,69%**			**1. Debit Air Baku yang tersedia;** **2. Persentase Sungai yang sudah dinormalisasi**	**110,44 liter/detik** **70,08%**	**6.266.989.879**	**7.722.993.316**	
26.05.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya			Kota Payakumbuh			Jumlah komunitas peduli sungai yang dibina	18 komunitas			79.443.219	127.393.219	47.950.000,00
26.12.	Pengadaan Tanah			Kota Payakumbuh			Luas lahan yang dibebaskan untuk normalisasi sungai	4,5 Ha			6.187.546.660	7.595.600.097	1.408.053.437,00
27.	**PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH**	**3**	**Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan**		**1. Persentase Pelayanan Air Minum;** **2. Persentase Sistem Drainase Skala Kota**	**96,22%** **45,95%**			**1. Persentase rumah yang terlayani air minum perpipaan;** **2. Persentase jalan kota yang memiliki drainase**	**1. 92,97%** **2. 45,95%**	**1.101.880.000**	**1.101.511.100**	
27.08.	Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah (OP Drainase)			Kota Payakumbuh			Panjang drainase yang dipelihara	25.100 m			916.400.000	916.031.100	(368.900,00)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS	SASARAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN						SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
					CAPAIAN PROGRAM (INDIKATOR SASARAN)		KELUARAN (OUTPUT)		HASIL (OUTCOME)				
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
27.10.	Penyesuaian Revisi Dokumen RISPAM			Kota Payakumbuh			Jumlah dokumen Revisi RISPAM yang disusun	1 dokumen			185.480.000	185.480.000	0,00
29.	**PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH**	**3**	**Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan**		**Persentase ketersediaan fasilitas umum perkotaan**	**72,06%**			**1. Persentase jalan yang memiliki trotoar;** **2. Persentase bangunan gedung pemerintah yang representative**	**14,41%;** **65%;**	**3.687.206.500**	**2.984.761.700**	
29.01.	Perencanaan pengembangan infrastruktur			Dinas PUPR Kota Payakumbuh			Jumlah dokumen HSBGN yang diterbitkan	4 dokumen			7.656.500	7.644.500	(12.000,00)
29.02.	Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur			Kota Payakumbuh			Panjang trotoar yang dibangun	535 meter			3.262.787.000	2.676.260.000	(586.527.000,00)
29.03.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			Kota Payakumbuh			Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang disusun	72 laporan			34.763.000	34.662.050	(100.950,00)
29.04.	Peningkatan dan Penguatan Pengembangan Insfrastruktur			Kota Payakumbuh			Jumlah pertimbangan teknis perencanaan bangunan yang dikeluarkan	300 berkas			237.000.000	171.965.150	(65.034.850,00)
29.05.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Trotoar			Kota Payakumbuh			Panjang Trotoar Yang Dipelihara	600 meter			145.000.000	94.230.000	(50.770.000,00)
30.	**PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN**	**3**	**Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan**		**Persentase Panjang jalan status kota dengan kondisi mantap**	**72,06%**			**Persentase jalan lingkungan yang sesuai kebutuhan**	**74,25%**	**8.570.801.065**	**8.076.315.076**	
30.02.	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan			Kota Payakumbuh			Panjang jalan lingkung yang dibangun	9.200 meter			8.570.801.065	8.076.315.076	(494.485.989,00)
31.	**PROGRAM PERENCANAAN PENATAAN RUANG**	**3**	**Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan**		**Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang**	**79,20%**			**Persentase ketersedian dokumen dan regulasi tata ruang**	**80%%**	**646.290.064**	**539.202.666**	
31.01.	Penyusunan Kebijakan tentang penyusunan tata ruang			Kota Payakumbuh			Jumlah dokumen penataan ruang yang ditetapkan	3 dokumen			162.880.325	165.400.825	2.520.500,00
31.06.	Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan			Kota Payakumbuh			1. Jumlah Blad RTRK yang dimutakhirkan; 2. Jumlah dokumen RDTR,RTRK yang disusun, dikaji dan dievaluasi	87 blad 1 dokumen			238.188.250	227.605.750	(10.582.500,00)
31.16.	Peningkatan dan Penguatan perencanaan tata ruang			Kota Payakumbuh			Persentase penerbitan KRK/AP yang sesuai dengan permohonan	90,00%			113.298.989	107.663.241	(5.635.748,00)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS	SASARAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN						SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
					CAPAIAN PROGRAM (INDIKATOR SASARAN)		KELUARAN (OUTPUT)		HASIL (OUTCOME)				
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
31.17.	Pengembangan sistem informasi penataan ruang			Kota Payakumbuh			1. Jumlah peta analog yang diinformasikan; 2. Jumlah peta digital yang diupdate	1 bwp 1 file sistem			131.922.500,00	38.532.850	(93.389.650,00)
32.	**PROGRAM PEMANFAATAN RUANG**	**3**	**Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan**		**Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang**	**79,20%**			**Persentase kepatuhan pelaku pembangunan sesuai rencana tata ruang**	**32,02%**	**489.202.500**	**489.200.900**	
32.01.	Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang			Kota Payakumbuh			Jumlah aturan hukum yang mengatur pemanfaatan ruang dan bangunan	1 dokumen			7.123.500	7.123.500	0,00
32.05.	Survey dan Pemetaan			Kota Payakumbuh			Persentase wilayah yang dilakukan survey & pemetaan untuk pendataan bangunan gedung	40%			256.669.000	256.667.400	(1.600,00)
32.07.	Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur, dan Manual Pemanfaatan Ruang			Kota Payakumbuh			Jumlah sosialisasi kebijakan, norma standar prosedur pemanfaatan ruang yang dilaksanakan	5 kecamatan			145.880.000	145.880.000	0,00
32.10.	Peningkatan dan Penguatan Pemanfaatan Ruang			Kota Payakumbuh			Jumlah rekomendasi IMB yang diberikan	600 berkas			79.530.000	79.530.000	0,00
33.	**PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG**	**3**	**Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan**		**Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang**	**79,20%**			**Persentase penertiban pelanggaranpemanfaatan ruang yang ditindak lanjuti**	**100,00%**	**72.642.800**	**109.631.000**	
33.01.	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang			Kota Payakumbuh			Jumlah aturan hukum yang mengatur pengendalian pemanfaatan ruang	1 perwako			7.179.000	7.179.000	0,00
33.05.	Pengawasan pemanfaatan ruang			Kota Payakumbuh			Jumlah pengawasan pemanfaatan ruang yang dilaksanakan	350 berkas			14.052.500	14.052.500	0,00
33.09.	Peningkatan dan penguatan pengendalian pemanfaatan ruang			Kota Payakumbuh			Jumlah teguran pelanggaran ruang yang diterbitkan	350 berkas			51.411.300	88.399.500	36.988.200,00
34.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI**	**3**	**Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan**		**Persentase ketersediaan fasilitas umum perkotaan**	**83,33%**			**Persentase bangunan gedung pemerintah yang representatif**	**70,00%**	**154.804.550**	**149.904.775**	
34.02.	Analisa/ Pengkajian Kelayakan perizinan			Kota Payakumbuh			1. Persentase badan usaha jasa konstruksi yang memenuhi kualifikasi;	1. 80%			8.322.025	8.322.025	0,00

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS	SASARAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN						SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
					CAPAIAN PROGRAM (INDIKATOR SASARAN)		KELUARAN (OUTPUT)		HASIL (OUTCOME)				
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
							2. Jumlah IUJK yang diterbitkan	2. 75 izin					
34.04.	Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi			Kota Payakumbuh			Jumlah Monitoring dan Evaluasi Badan Usaha Jasa Konstruksi	5 kali			8.798.750	8.798.750	0,00
34.05.	Pembinaan Kompetensi dan Produktifitas Konstruksi			Kota Payakumbuh			Jumlah tenaga konstruksi yang dibina	100 orang			36.576.250	33.475.850	(3.100.400,00)
34.06.	Pembinaan Tertib Penyelenggaraan Konstuksi			Kota Payakumbuh			Jumlah sosialisasi peraturan perundangan dan jasa konstruksi yang dilaksanakan	2 kali			101.107.525,00	99.308.150	(1.799.375,00)
37	**PROGRAM PERLUASAN DAN PENINGKATAN SAMBUNGAN RUMAH (SR)**	**3**	**Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan**		**Persentase pelayanan air minum**	**96,22%**			**Persentase rumah yang terlayani air minum perpipaan**	**92,97%**	**2.958.602.000**	**2.942.600.000**	
37.02.	Penambahan Jaringan Distribusi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			Kota Payakumbuh			Panjang jaringan distribusi air minum yang dibangun	405.532 meter			2.958.602.000	2.942.600.000	(16.002.000,00)
16.	**PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH**	**3**	**Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan**		**Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang**	**79,02%**			**Persentase sertifikasi aset tanah dan bangunan pemko**	**59,55%**	**50.340.000**	**50.340.000**	
16.01.	Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah			Kota Payakumbuh			1. Jumlah aset tanah Pemko yang memiliki dokumen hibah/ penyerahan 2. Jumlah sertifikasi aset tanah pemko yang dilaksanakan	134 persil 15 persil			50.340.000	50.340.000	0,00
38.	**Program Pembangunan Fasilitas Umum**	**3**	**Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan**		**Persentase ketersediaan fasilitas umum perkotaan**	**83,33%**			**Persentase bangunan sarana ibadah yang representatif**	**71,00%**	**6.885.560.000**	**6.892.610.000**	
38.01.	Pengadaan Tanah Mesjid Agung			Kota Payakumbuh			Persentase pelaksanaan pembangunan sarana ibadah skala kota	10%			6.885.560.000	6.892.610.000	7.050.000,00
											115.299.006.485	**114.819.006.485**	

BAB 4
PENUTUP

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan analisis realisasi anggaran dan kinerja triwulan II (Bulan Mei) 2019. Dokumen ini disusun untuk mencapai efektifitas, efisiensi dan transparansi dari pelaksanaan program dan kegiatan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2019 di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh. Dalam upaya untuk mencapai target tahun 2019, perubahan yang terjadi pada program dan kegiatan tahun 2019 telah mengakomodir realisasi pelaksanaan kegiatan pada medio 2019.

Dengan adanya dokumen ini diharapkan seluruh jajaran pegawai di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Payakumbuh dapat mempedomani isi dokumen Perubahan Renja SKPD tahun 2019 ini dengan sebaik-baiknya. Akhir kata, Saran dan kritik yang membangun selalu kami harapkan demi perbaikan kedepannya.

Payakumbuh, Juli 2019

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST,M.Si
NIP. 19750402 200003 1 005

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PAYAKUMBUH

JL. RKY RASUNA SAID NO,43 TELP (0752) 93947 FAX. 909810-PAYAKUMBUH

PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	KINERJA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH				KINERJA HASIL PERANGKAT DAERAH					KINERJA KELUARAN PERANGKAT DAERAH				
	SASARAN		INDIKATOR			SASARAN		INDIKATOR	TARGET		SASARAN		INDIKATOR	TARGET
SASARAN 1														
1	Meningkatnya Kesesuaian Guna Lahan Dengan Rencana Tata Ruang	1	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	79.20%	1	Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang	1	Persentase Ketersediaan Dokumen dan Regulasi Tata Ruang Yang Tersedia	50.00%	1	Meningkatnya substansi rencana tata ruang dan kualitas sistem informasi penataan ruang	1	Jumlah dokumen penataan ruang yang ditetapkan	3 Dokumen
												2	Jumlah Blad RTRK yang dimutakhirkan	87 Blad
												3	Jumlah dokumen RDTR. PZ, RTRK, yang disusun, dikaji dan dievaluasi.	1 dokumen
												4	Jumlah aturan hukum yang mengatur pemanfaatan ruang dan bangunan	1 Dokumen
												5	Jumlah aturan hukum yang mengatur pengendalian pemanfaatan ruang	1 Perwako
												6	Persentase wilayah yang dilakukan survey & pemetaan untuk pendataan bangunan	40.00%
												7	Jumlah peta analog yang diinformasikan	1 bwp
												8	Jumlah peta digital yang diupdate	1 file sistem
					2	Meningkatnya kesesuaian pembangunan dengan rencana tata ruang	1	Persentase Kepatuhan Pelaku Pembangunan Sesuai Rencana Tata Ruang	32.02%	1	Meningkatnya tertib Pemanfaatan ruang sesuai dokumen perizinan	1	Persentase Penerbitan KRK/ AP yang sesuai dengan permohonan	90.00%
												2	Jumlah Advice planning yang diterbitkan	450 berkas
												3	Jumlah Sosialisasi Kebijakan, Norma Standar Prosedur pemanfaatan ruang yang dilaksanakan	5 Kecamatan
												4	Jumlah Papan Informasi kebijakan norma, standar, prosedur yang dipasang	60 unit
												5	Jumlah Rekomendasi IMB yang diberikan	600 Berkas
							2	Persentase Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	85.00%	2	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap rencana tata ruang	1	Jumlah Pengawasan pemanfaatan ruang yang dilaksanakan	350 berkas
												2	Jumlah teguran pelanggaran ruang yang diterbitkan	350 berkas
							3	Persentase Sertifikasi Aset Tanah dan Bangunan Pemerintah Kota	14.29%	3	Meningkatnya kepastian hukum tanah untuk pembangunan sarana dan infrastruktur dasar	1	Jumlah aset tanah pemko yang memiliki dokumen hibah/ penyerahan	134 persil
												2	Jumlah sertifikasi asset tanah pemko yang dilaksanakan.	15 persil
2	Meningkatnya infrastruktur dasar publik yang sesuai standar	1	Persentase Daerah Irigasi Berkinerja Baik	79.10%	1	Meningkatnya kualitas infrastruktur sumber daya air	1	Persentase irigasi dengan kondisi baik	80.23%	1	Meningkatnya Ketersediaan Irigasi	1	Jumlah dokumen perencanaan, pembangunan/ pemeliharaan jaringan irigasi yang disusun	1 dokumen
												3	Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	10.400 meter
												4	Jumlah daerah irigasi yang dipelihara	30
												5	Luas Areal Sawah yang teraliri irigasi	2,55 Hektar
												6	Persentase Irigasi yang dipelihara	56,95%
							2	Persentase ketersediaan debit air irigasi	90.44%			2	Jumlah pintu air yang dibangun	2 unit
												7	Jumlah pintu air yang dipelihara	3 unit

NO	KINERJA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH				KINERJA HASIL PERANGKAT DAERAH					KINERJA KELUARAN PERANGKAT DAERAH				
	SASARAN	INDIKATOR			SASARAN		INDIKATOR		TARGET	SASARAN		INDIKATOR		TARGET
							3	Persentase kelompok P3A/GP3A yang aktif	81.33%			8	Persentase kelompok P3A/ GP3A yang dibina	87.00%
												9	Jumlah kelompok P3A/ GP3A yang dibina	87.00%
		2	Persentase Penataan Sungai	21.69%			4	Persentase Sungai Berfungsi Baik	76.00%	2	Meningkatnya pelestarian dan pemanfaatan sungai	1	Panjang turap/ talud/ bronjong yang dibangun	210 meter
												2	Jumlah dokumen perencanaan/ penataan sungai yang disusun	1 dokumen
												3	Panjang sungai yang dinormalisasi	530 meter
												4	Luas lahan yang dibebaskan untuk normalisasi sungai	4,5 Ha
												5	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dipelihara	7 DAS
							5	Persentase Debit Air Baku Yang Tersedia	100,44 ltr/dtk			6	Panjang sungai yang dipelihara	23.451 meter
												7	Jumlah komunitas peduli sungai yang dibina	18 komunitas
												8	Luas lahan yang dibebaskan untuk normalisasi sungai	4,5 Ha
		3	Persentase Pelayanan Air Minum	98.80%			6	Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Perpipaan	96.22%	3	Meningkatnya Pelayanan Air Minum	1	Jumlah dokumen revisi RISPAM yang disusun	1 dokumen
												2	Panjang Jaringan distribusi air minum yang dibangun	405.532 meter
												3	Jumlah Penduduk yang terlayani air minum	132.155 jiwa
												4	Jumlah Sambungan rumah terpasang	25.490 SR
		4	Persentase Panjang Jalan Status Kota dengan Kondisi Mantap	72.06%	2	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	1	Persentase jalan lingkung sesuai kebutuhan	68.92%	1	Meningkatnya Penyediaan jalan lingkung	1	Panjang jalan lingkung yang dibangun	9,200 meter
							2	Persentase Ketersediaan Jalan Kota sesuai Kebutuhan	99.48%	2	Meningkatnya Penyediaan jalan dan jembatan status kota	1	Panjang jalan baru yang dibangun	1.410 meter
												2	Jumlah jembatan baru yang dibangun	1 Unit
												3	Jumlah persil lahan yang dibebaskan untuk pembangunan dan peningkatan jalan	5 Ruas
							3	Persentase Jalan Kota yang Memenuhi Standar Konstruksi dan fungsi	50.41%	3	Mempertahankan kondisi jalan dan Jembatan	1	Panjang Jalan yang dipelihara	23.000 meter
												2	Jumlah Jembatan yang dipelihara	6 unit
										4	Meningkatnya kualitas dan struktur jalan	1	Panjang jalan yang ditingkatkan	10.400 meter
												2	Panjang bahu jalan yang ditingkatkan	7.200 meter
							4	Persentase Jalan yang dilayani Penerangan Jalan Umum (PJU)	39.28%	5	Meningkatnya kualitas penerangan jalan umum	1	Persentase lampu jalan yang terpasang berdasarkan kebutuhan	38.68%
												2	Jumlah Penerangan Jalan Umum yang dipelihara	815 titik
							5	Persentase pemenuhan alat berat berfungsi baik	86.36%	6	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	1	Jumlah pengadaan alat berat yang dilakukan	3 unit
												2	Jumlah alat berat yang dipelihara	22 unit
							6	Persentase alat laboratorium Konstruksi dengan kondisi baik	95.00%			3	Jumlah pengadaan alat pengujian dan bahan laboratorium yang dilakukan	2 set
												4	Jumlah alat laboratorium yang dipelihara	3 set

NO	KINERJA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH				KINERJA HASIL PERANGKAT DAERAH					KINERJA KELUARAN PERANGKAT DAERAH				
	SASARAN	INDIKATOR			SASARAN		INDIKATOR		TARGET	SASARAN		INDIKATOR		TARGET
							7	Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar	7.57%	8	Meningkatnya Prasarana untuk pejalan kaki	1	Panjang trotoar yang dibangun	535 meter
												2	Panjang trotoar yang dipelihara	600 meter
		5	Persentase Sistem Drainase Skala Kota	45.95%			8	Persentase Ketersediaan Drainase sesuai Kebutuhan	59.95%	7	Meningkatnya jalan yang memiliki drainase	1	Panjang drainase yang dibangun	17.100 meter
							9	Persentase Jalan Kota yang memiliki Drainase	45.95%			2	Panjang drainase yang dipelihara	25.100 meter
		6	Persentase Ketersediaan Fasilitas Umum Perkotaan	83.33%	3	Meningkatnya Penyediaan dan Penataan Bangunan Gedung	1	Persentase Penyediaan Sarana Perkantoran tertentu yang representatif	80.00%	1	Meningkatnya Penyediaan Sarana Dan Prasarana Ibadah Dan Perkantoran	1	Jumlah sarana dan prasarana gedung skala kota yang dibangun	3 unit
							2	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah yang Representatif	71.16%			2	Persentase pelaksanaan pembangunan sarana ibadah skala kota	10.00%
												3	Luas lahan yang dibebaskan untuk pembangunan sarana ibadah skala kota	1,2 Hektar
										2	Meningkatnya Penataan Konstruksi Bangunan Gedung, Dan Lingkungan	1	Jumlah dokumen HSBGN yang diterbitkan	4 dokumen
												2	Jumlah pertimbangan teknis perencanaan bangunan yang dikeluarkan	300 berkas
												3	Jumlah rekomendasi perencanaan bangunan gedung yang dikeluarkan	30 berkas
							3	Persentase badan usaha jasa konstruksi yang memenuhi kualifikasi	80.00%	3	Meningkatnya Badan Usaha Jasa Konstruksi Yang Memiliki Kualifikasi Sesuai Standar	1	Jumlah Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang diterbitkan.	75 izin
												2	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Badan Usaha Jasa Konstruksi	5 kali
												3	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang dibina	100 orang
												4	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan dan jasa Konstruksi yang dilaksanakan	2 kali
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1	Predikat Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	A	1	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja dinas	1	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	85.00%	1	Meningkatnya kualitas dokumentasi dan pelaporan	1	Jumlah laporan pencapaian kinerja dan ikhtisar kinerja yang disusun	10 dokumen
												2	Jumlah Buku Profil Dinas PUPR yang disusun	45 eksemplar
												3	Jumlah capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD yang disebarluaskan dan dipublikasikan	10 liputan
							2	Indeks Reformasi Birokrasi (PMPRB) Dinas	18.00			4	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik yang disusun	7 dokumen
							3	Persentase Kinerja Kepegawaian	100.00%			5	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang disusun	72 laporan
							4	Persentase Capaian Kinerja Realisasi Program/ Kegiatan	95.00%	2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan kedinasan	1	Persentase sasaran, program, dan kegiatan renja yang selaras dengan renstra	100%
												4	Persentase sasaran, program, dan kegiatan renja pd yang selaras dengan rkpd	100%
												2	Persentase capaian kinerja realisasi keuangan	100%
												3	Persentase capaian kinerja realisasi penerimaan daerah skpd	100%

NO	KINERJA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH				KINERJA HASIL PERANGKAT DAERAH					KINERJA KELUARAN PERANGKAT DAERAH				
	SASARAN	INDIKATOR			SASARAN		INDIKATOR		TARGET	SASARAN		INDIKATOR		TARGET
							5	Persentase ASN Berpakaian Dinas dengan Atribut Lengkap	100.00%	3	Meningkatnya Kapasitas Sumber daya dinas	1	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya yang dilakukan	151 Stel
							6	Persentase ASN Menduduki Jabatan Sesuai Kompetensi	80.00%			2	Persentase ASN yang mengikuti bimtek sesuai kompetensi	90%
							7	Persentase ASN berperilaku disiplin	90.00%			3	Persentase ASN yang terlambat melebihi aturan kepegawaian	8%
							8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas	81.00	4	Meningkatnya operasional dinas	1	Jumlah Rekening Listrik, Telepon dan Air yang dibayarkan	144 rekening bulan
												2	Jumlah Pajak Kendaraan Dinas/	79 unit
												3	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang	982 orang bulan
												4	Jumlah tenaga kebersihan yang dibayarkan	36 orang bulan
												5	Jumlah bahan kebersihan kantor yang	429 buah
												6	Jumlah Peralatan Kerja yang Diperbaiki	123 unit
												7	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Dibeli	3.231 buah
												8	Jumlah cetak, fotocopy, dan jilid dokumen dinas yang disediakan	500 buah
														2 kotak
														550 Buku
														82.937 Lembar
												9	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/	155 buah/roll
												10	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	16 unit
														5 set
												11	Jumlah bahan bacaan dan peraturan	4776 ekslempar
												12	Jumlah Makanan dan Minuman yang tersedia untuk Kegiatan Dinas	1.300 Porsi
														1.300 Bungkus
														120 Galon
														40 Kotak
												13	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah, luar daerah dan luar negri yang dilakukan	152 perjalanan
												14	Jumlah Gaji Tenaga Administrasi dan Tenaga Teknis Perkantoran yang Dibayarkan	108 Orang bulan
							9	Persentase Kondisi Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam kondisi baik	85.00%			15	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	1 unit
												16	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dilpelihara	83 unit
												17	Jumlah mebeleur yang dilakukan pemeliharaan rutin	14 unit
												18	Persentase ASET pemda kewenangan dinas yang tidak termanfaatkan	4%
							10	Persentase aset Pemda kewenangan dinas dalam kondisi baik	70.00%			19	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kerja yang dilakukan	10 unit
							11	Persentase Capaian Kinerja Realisasi Program/ Kegiatan	95.00%	4	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan kedinasan	1	Persentase sasaran, program, dan kegiatan renja yang selaras dengan renstra	100%

NO	KINERJA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH				KINERJA HASIL PERANGKAT DAERAH					KINERJA KELUARAN PERANGKAT DAERAH				
	SASARAN	INDIKATOR			SASARAN	INDIKATOR			TARGET	SASARAN		INDIKATOR		TARGET
												4	Persentase sasaran, program, dan kegiatan renja pd yang selaras dengan rkpd	100%
												2	Persentase capaian kinerja realisasi keuangan	100%
												3	Persentase capaian kinerja realisasi penerimaan daerah skpd	100%

Payakumbuh, September 2019

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST,M.Si

NIP. 19750402 200003 1 005